

REMITANSI PEKERJA MIGRAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LOMBOK TIMUR

MIGRANT WORKER REMITTANCES DURING COVID-19 PANDEMIC IN EAST LOMBOK

Saipul Hamdi^{1*}, Syarifuddin², Oryza Pneumatica Inderasari³, Lina Febriani⁴, Nurul Haromain⁵, Ikmal Maulana⁶, Ihfan Rahmawadi⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Program Studi Sosiologi Universitas Mataram, Jl. Majapahit No. 62 Mataram,
Nusa Tenggara Barat, Indonesia
e-mail: shamdi@unram.ac.id*

Diserahkan : 10/06/2023; Diperbaiki : 13/09/2023; Disetujui : 18/09/2023
DOI : 10.47441/jkp.v18i2.328

Abstrak

Covid-19 telah tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia pada awal 2020an berdampak besar terhadap remitansi pekerja migran, termasuk pengurangan jam kerja, pemutusan hubungan kerja, hingga dipulangkan secara paksa. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dan pengelolaan remitansi oleh keluarga migran sebelum dan selama masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Suralaga Lombok Timur, serta upaya pemerintah untuk membantu supaya berhasil dalam pengelolaan remitansi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif teknik pengambilan data melalui observasi-partisipasi, wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD) dan dokumentasi. Informan terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat, keluarga pekerja migran, mantan pekerja migran dan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja dan keluarga pekerja migran di Suralaga umumnya mengalami gangguan remitansi setelah munculnya Covid-19. Mereka tidak hanya kesulitan dalam memperoleh *income* yang normal, tetapi juga sangat kesulitan dalam mengirim uang tersebut karena akses perbankan saat itu ditutup. Sebelum masa Covid-19, pekerja migran dan keluarga mengelola remitansi mereka untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, membangun atau merenovasi rumah, biaya pendidikan anak, membeli tanah pekarangan dan sawah serta beternak. Namun, selama masa pandemi Covid-19, pengelolaan remitansi oleh keluarga pekerja migran lebih banyak dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kesimpulan yang didapatkan adalah masalah utama yang dihadapi pekerja migran selama Covid-19 adalah remitansi yang tidak stabil, bahkan sebagian besar di antara mereka gagal memperoleh remitansi. Intervensi dari pemerintah daerah adalah dengan menawarkan program bantuan pengelolaan dan pemanfaatan remitansi selama masa Covid-19.

Keywords: Remitansi, Pekerja Migran, Covid-19

Abstract

This article aims to explore the impact and management of remittances by migrant families before and during the COVID-19 pandemic in Suralaga District, East Lombok, and the government's help in managing these remittances. This research uses qualitative methods. Data were obtained by observation, in-depth interviews, FGD, and documentation. The research results show that workers and families of migrant workers in Suralaga generally experienced disruption in remittances after the emergence of COVID-19. Not only had problems getting a regular income but also needed help sending money because banking access was closed then. During the COVID-19 pandemic, the remittances were allocated more to fulfill daily needs and no longer for secondary needs like before. The government's intervention offered a program to help manage and utilize remittances during COVID-19.

Keywords: Remittances, Migrant Workers, Covid-19

PENDAHULUAN

Sebagai daerah penyuplai pekerja migran terbesar keempat di Indonesia, berdasarkan data penempatan pekerja migran Indonesia yang dimuat dalam laporan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan bahwa Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengirim sebanyak 30.706 orang pada periode 2019. Kabupaten Lombok Timur menempati posisi pertama kabupaten penyuplai pekerja migran Indonesia (PMI) terbanyak di NTB yakni berjumlah sekitar 12.000 orang. Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Tingginya jumlah PMI ini berkontribusi positif bagi negara karena remitansi para PMI ini menjadi sumber penerimaan devisa bagi Indonesia. Remitansi adalah transfer uang yang dilakukan pekerja asing ke penerima di negara asalnya. Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB (Disnakertrans 2020), sepanjang 2018 para PMI dari berbagai daerah di provinsi NTB telah mengirim remitansi sekitar Rp 1,3 Triliun, sedangkan remitansi sepanjang 2020 berjumlah Rp 1,1 Triliun. Itu artinya remitansi PMI NTB mengalami penurunan selama masa pandemi Covid-19.

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) memang menjadi isu kesehatan global yang menggemparkan dunia sejak akhir tahun 2019 yang awal kemunculannya di Wuhan, China. Penyebarannya yang begitu cepat menyebabkan banyak negara di dunia terjangkit dalam waktu singkat termasuk Indonesia. Indira Rezkisari dalam *Harian Republika* (2021) menyebutkan bahwa pada Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi dua orang divonis terjangkit virus corona jenis baru (Covid-19). Sejak saat itu penyebarannya di Indonesia sangat cepat dan melumpuhkan berbagai sektor kehidupan dalam waktu singkat. Menyikapi sebaran Covid-19 tersebut, pemerintah langsung sigap dengan mengimbau masyarakat melakukan *social distancing* (jarak sosial) dan *physical distancing* (jarak fisik) hingga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah. Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanggulangan Covid-19 yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan (Wiryawan 2020).

Data menunjukan bahwa terhitung sejak Maret 2020 hingga Maret 2022 kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah menyentuh angka 6.005.646 jiwa, sembuh sebanyak 5.735.055 jiwa dan meninggal dunia berjumlah 154.882 jiwa (Retaduari 2020). Tidak hanya kerentanan dalam bidang kesehatan, pengaruh besar Covid-19 juga sangat terasa dalam bidang sosial ekonomi (referensi). Pengaruh besar dalam bidang ekonomi ini dapat dilihat banyak perusahaan atau industri yang mengalami penurunan penghasilan bahkan mengalami kerugian dan gulung tikar. Hal ini yang kemudian menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut mengambil langkah untuk merumahkan dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran terhadap karyawannya. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan 1 Mei 2020, jumlah pekerja sektor formal yang dirumahkan akibat pandemi Covid-19 adalah 1.032.960, yang di PHK sebanyak 314.833 sehingga total pekerja yang terdampak Covid-19 adalah 1.722.958 orang (Sofuroh 2020).

Covid-19 tidak hanya berdampak pada pekerja migran Indonesia, tetapi juga pada pekerja di dalam negeri. Terjadi pelemahan ekonomi yang kemudian berisiko pada penurunan peluang kerja para migran (Aswindo, Hanita, and Simon 2021). Para petugas PMI rentan kehilangan pekerjaan, upah tidak dibayarkan, memiliki tabungan yang rendah dan sulitnya akses untuk jaminan sosial. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat bahwa di tanggal 29 Maret 2020 terdapat 33.503 orang dipulangkan dari 8 negara penempatan termasuk Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Korea Selatan, Italia, Jepang dan Amerika Serikat (Anjaeni 2020).

Selain tindakan pemulangan para petugas PMI, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga memutuskan untuk melakukan pemberhentian sementara penempatan PMI ke luar negeri sebagai langkah untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 151 Tahun 2020 tentang penghentian sementara penempatan pekerja migran Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa bagi PMI yang memiliki visa dan tiket transportasi ke negara tujuan penempatan bisa diberangkatkan asalkan negara tujuan penempatan tersebut tidak menutup akses masuknya orang asing untuk bekerja (Ronald 2020). Berbagai risiko yang dihadapi para petugas PMI di luar negeri ini kemudian memunculkan persoalan baru yakni terkait remitansi. Kami berargumen bahwa Covid-19 dan pengaruh kebijakan-kebijakan oleh pemerintah di berbagai negara tidak hanya mengganggu produktivitas remitansi, tetapi juga menutup mobilitas komunitas pekerja migran yang berdampak luas terhadap kehidupan mereka. Remitansi ini berperan sangat penting dalam keluarga pekerja migran khususnya dalam membantu ekonomi rumah tangga. Remitansi merupakan sumber pemasukan utama bagi sebagian besar keluarga pekerja migran. Remitansi dimanfaatkan untuk berbagai hal, bahkan dianggap juga sebagai basis pengembangan usaha mikro pada keluarga pekerja migran (Maghribie, Trisnaningsih, and Haryono 2019). Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi perubahan pengelolaan remitansi pada masa Covid-19 oleh keluarga pekerja migran. Isu ini sangat penting untuk dibahas di tengah tekanan ekonomi hebat pekerja migran selama masa Covid-19.

Penelitian yang membahas terkait pengelolaan remitansi PMI di tengah masa pandemi belum banyak dilakukan oleh peneliti lokal dan nasional. Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas terkait remitansi yakni pola pemanfaatan remitan perantau Nagari Atar (Yolanda 2020), model manajemen remitansi pada rumah tangga TKI (Susilo and Marhadi 2016), analisis pola penggunaan remitan migrasi internasional secara produktif dan konsumtif (Mustapita and Rizal 2017), pemanfaatan remitansi pekerja migran Indonesia serta peran usaha pekerja migran Indonesia purna untuk pembangunan desa asal (Dewandaru, Rahmadi, and Sya'idah 2019), remitan sebagai dampak migrasi pekerja ke Malaysia (Primawati 2011). Adapun tulisan yang membahas terkait pekerja migran di tengah masa pandemi yakni analisis pengaruh perubahan pola mobilitas remitansi TKI selama pandemi Covid-19 terhadap keluarga migran (Mahesti, Amin, and others 2021), pekerja migran Indonesia di tengah pandemi Covid-19 dalam bingkai media daring (Qawiyurrijal 2021), kerentanan dan ketahanan pekerja migran Indonesia di Malaysia pada masa pandemi Covid-19 (Aswindo, Hanita, and Simon 2021).

Tulisan Afrindah Ikrimah dkk, (2020) menguatkan pandangan tentang peran remitansi menjadi sumber pemasukan utama bagi sebagian besar keluarga pekerja migran. Tangkore dkk, (2018) juga melihat remitansi dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan serta kesejahteraan hidup para migran dan keluarga. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang baik guna mendapatkan manfaat yang maksimal dari remitansi tersebut. Selain sebagai sumber pendapatan utama bagi keluarga, remitansi ini juga merupakan salah satu sumber pendapatan bagi daerah asal migran melalui devisa negara. Ketika masuk di keluarga dan juga daerah remitansi ini dapat memberikan kontribusi baik dalam bentuk material maupun nonmaterial seperti peningkatan sumber daya manusia termasuk peningkatan keterampilan, dan pengetahuan (Aryani 2019; Sukesu, Rosalinda, dkk 2017). Ketika kembali ke daerah asal, para pekerja migran ini akan membawa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di tempat kerjanya berupa etos kerja dan lain sebagainya. Etos kerja yang lebih baik dari daerah asal ini diharapkan mampu mempengaruhi lingkungan sekitar tempat tinggal migran yang kemudian nantinya akan membawa dampak yang lebih baik bagi kehidupan sosial masyarakat di daerah tersebut.

Penelitian-penelitian tersebut belum ada yang secara spesifik membahas remitansi pekerja migran dalam konteks Pandemi Covid-19, sedangkan Covid-19 itu sendiri berdampak besar terhadap dunia kerja yang membutuhkan sentuhan fisik dan komunikasi yang intens di antar pekerja. Inilah salah satu alasan mengapa penelitian ini penting untuk

dilakukan. Isu remitansi yang macet dan melambat menimbulkan masalah baru di masyarakat terutama bagi keluarga pekerja migran yang hanya mengandalkan *income* dari remitansi itu. Beban ganda muncul ketika pekerja migran mengalami deportasi dan menambah pengangguran baru di keluarga dan masyarakat. Yang menjadi novelti dari penelitian ini adalah bagaimana respon pemerintah daerah terutama dari pemerintah desa dalam upaya membantu mencari solusi supaya pekerja migran dan keluarga dapat bertahan hidup di tengah tekanan Pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di tiga desa yakni Desa Suralaga, Desa Paok Lombok dan Desa Dasan Borok. Ketiga desa ini berada di wilayah Kecamatan Suralaga Lombok Timur. Kecamatan Suralaga dikenal sebagai daerah penyumbang pekerja migran terbesar di Lombok Timur. Hampir di semua desa di Suralaga dapat ditemukan kampung-kampung pekerja migran. Rumah mereka permanen dan jauh lebih bagus dari rumah-rumah warga yang bukan pekerja migran. Oleh karena itu wilayah Suralaga ini sebagai tempat lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan (Januari-Juni 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui observasi-partisipasi, wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak 30 orang yang terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat, anggota keluarga PMI, mantan PMI dan masyarakat lokal. Metode analisa data menggunakan metode analisa tematik dan analisa naratif, selain menafsirkan data-data berdasarkan tema-tema yang diangkat, juga mendalami narasi-narasi dari pekerja migran terkait pengelolaan remitansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Remitansi Pekerja Migran di Suralaga Lombok Timur

Remitansi merupakan hasil kerja migran di negara tujuan berupa uang dan barang yang dikirimkan kepada keluarga di daerah asal. Remitansi menjadi indikator penting dalam perekonomian keluarga migran karena menjadi sumber pemasukan utama bagi sebagian besar keluarga migran. Dari remitansi inilah mereka menggantungkan kebutuhan hidup keluarganya mulai dari kebutuhan sehari-hari, kebutuhan biaya pendidikan, renovasi rumah dan juga pembelian pekarangan. Berdirinya rumah-rumah baru di sepanjang wilayah kecamatan Suralaga misalnya menjadi bukti berhasilnya pekerja migran mencari rezeki di tanah rantau. Artinya, remitansi mereka dapat dikelola dengan baik oleh keluarganya sehingga dia dapat merenovasi atau membangun rumah baru.

Menjadi keluarga pekerja migran dengan remitansi yang sangat besar untuk ukuran hidup di desa melahirkan kelas-kelas baru di kecamatan itu. Perubahan gaya hidup dan perilaku sosial antara keluarga pekerja migran dengan keluarga yang tidak menjadi pekerja migran cukup jelas terlihat perbedaannya. Contohnya dari aspek barang-barang yang dipakai atau digunakan oleh keluarga pekerja migran lebih mahal dan bagus jika dibandingkan keluarga bukan pekerja migran. Sebagian besar anak-anak pekerja migran juga telah masuk di perguruan tinggi dan berhasil menjadi sarjana.

Ekonomi pekerja migran terguncang setelah Covid-19 tersebar sejak 2020, yang turut berpengaruh pada jumlah remitansi para pekerja migran yang terus merosot. Selama masa pandemi, terjadi beberapa permasalahan terkait remitansi seperti berkurangnya jumlah nominal penghasilan dan berkurangnya frekuensi pengiriman uang dari pekerja migran kepada keluarganya di desa. Hal tersebut terjadi karena banyak negara menerapkan kebijakan *lockdown*, menutup akses keluar ataupun masuk. Dengan demikian banyak kegiatan sosial ekonomi dihentikan sementara waktu. Akhirnya kebijakan tersebut

berdampak juga pada terganggunya remitansi pekerja migran akibat banyaknya pekerja migran yang mengalami pemotongan gaji, pengurangan jam kerja, dirumahkan, hingga mengalami PHK. Berikut kutipan wawancara dengan informan Sekretaris Desa Paok Lombok:

“Memang di tahun 2021 kemarin masyarakat kita sangat kesulitan, khususnya yang di Malaysia. Kebijakan lockdown mengharuskan para bos sawit menutup sementara tempat kerjanya, akibatnya para PMI ini tidak bisa bekerja. Bahkan dari informasi warga terdapat PMI tidak mengirimkan uang untuk keluarganya (remitansi) sampai 8 bulan, malah sebaliknya, mereka yang dikirimkan uang dari sini untuk biaya hidup di sana”

(Muh. Kencana; wawancara tanggal 14 Maret 2022).

Kutipan wawancara di atas memperlihatkan betapa besar pengaruh pandemi Covid-19 pada pekerja migran khususnya remitansi yang mereka kirimkan untuk keluarga di daerah asal. Kebijakan *lockdown* baik dari perusahaan tempat para pekerja migran bekerja maupun *lockdown* fasilitas bandara benar-benar mematikan mobiltias pekerja migran. Temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa terdapat pekerja migran yang mengalami pengurangan jam kerja dan pemotongan gaji. Berikut kutipan wawancara dengan informan mantan pekerja migran perempuan Desa Paok Lombok:

“Kemarin selama pandemi Covid-19 saya hanya digaji setengahnya karena kan saya kerja di perusahaan gitu, jadi tergantung schedul. Kadang majikan juga takut nge-booking kita, jadi gak full kerja”

(Hafazah Putri, wawancara tanggal 15 Maret 2022).

Dampak yang serupa rata-rata dirasakan oleh pekerja migran legal karena mereka terikat peraturan di tempat bekerja selama masa pandemi Covid-19. Perusahaan resmi tempat mereka bekerja harus mengikuti instruksi Kerajaan Malaysia. Fakta di lapangan bahwa tidak hanya perusahaan yang melakukan *lockdown*, tetapi pekerja migran dipulangkan secara paksa untuk menekan penyebaran Covid-19. Kondisi inilah yang kemudian sangat berdampak pada remitansi mereka. Akan tetapi, hal yang berbeda terjadi di kelompok pekerja migran ilegal, banyak dari mereka yang masih bisa bekerja dan tetap mendapatkan gaji selama masa Pandemi Covid-19. Ini bisa terjadi karena tidak ada aturan khusus di tempat mereka bekerja, termasuk keharusan mengikuti kebijakan pemerintah pusat Malaysia. Perusahaan masih dapat beroperasi secara diam-diam. Meskipun *lockdown* masih diberlakukan, para PMI ilegal tetap memiliki akses keluar masuk Malaysia. Di sinilah para pekerja migran ilegal dapat bekerja dan memperoleh remitansi dan keluarga mereka di daerah asal tetap menerima kiriman remitansi tersebut, seperti wawancara dengan informan istri pekerja migran Malaysia,

“Dulu awal-awal berangkat pake permit, tapi karena total hampir 17 tahun merantau jadi ya sekarang biasa saja dia lewat jalur ilegal. Kalau lewat jalur ilegal paling yang menjadi kendalanya karena bank tutup, kalau gaji si tetep lancar seperti biasa. Apalagi sekarang kan sudah mulai normal, jadi apa yang kita butuhkan ya tetap dikirimkan oleh suami.”

(Hj. Humaira; wawancara tanggal 13 Maret 2022)

Data yang sama juga temukan dari ungkapan beberapa informan yang anggota keluarganya berstatus menjadi pekerja migran ilegal. Mereka mengaku tetap mendapatkan kiriman uang selama masa pandemi Covid-19. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dampak pandemi Covid-19 terhadap remitansi antara pekerja migran legal dan ilegal. Rata-rata remitansi pekerja migran ilegal tidak terpengaruh dengan adanya pandemi Covid-19. Sedangkan remitansi pekerja legal mengalami penurunan akibat banyak yang mengalami pengurangan jam kerja, dirumahkan, hingga PHK.

Adanya perbedaan dampak Covid-19 terhadap remitansi pekerja migran legal dan ilegal secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk menjadi pekerja migran ilegal. Kondisi perekonomian di daerah asal yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 membuat banyak mantan pekerja migran ingin kembali merantau meskipun dengan jalan ilegal. Pada saat yang bersamaan selama masa pandemi Covid-19 pemerintah melakukan pemberhentian sementara penempatan pekerja migran. Inilah yang kemudian mendorong masyarakat terutama para mantan pekerja migran di Kecamatan Suralaga memilih untuk berangkat melalui jalur ilegal. Seperti yang diungkapkan oleh Masitah seorang pensiunan guru asal desa Paok Lombok,

“Perekonomian masyarakat termasuk keluarga migran rata-rata sih berkurang akibat pandemi ini, dan yang sudah terlanjur pulang tidak bisa balik lagi. Tapi untuk orang-orang yang tidak betah dengan kondisi ini (pandemi) banyak yang memilih jalur ilegal untuk berangkat”

(Masitah; wawancara tanggal 15 Maret 2022).

Berdasarkan informasi wawancara dan observasi, banyak keluarga pekerja migran di kecamatan Suralaga yang menggantungkan hidupnya pada remitansi. Bahkan untuk beberapa keluarga pekerja migran, remitansi menjadi sumber pemasukan utama mereka. Jika tidak ada remitansi, sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Besarnya peran remitansi terlebih saat kesulitan ekonomi di daerah asal pada masa pandemi Covid-19 telah mendorong sebagian besar pekerja migran mengambil risiko menempuh jalan ilegal. Selain itu, faktor paling besar adalah adanya perbedaan dampak pandemi terhadap remitansi pada pekerja migran legal dan ilegal.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Remitansi Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19

Remitansi pekerja migran memiliki peran yang sangat besar tidak hanya untuk keluarga pekerja migran saja, tetapi juga bagi daerah dan negara asal mereka. Manfaat yang maksimal bisa didapat jika keluarga pekerja migran mengelola dan memanfaatkan remitansi tersebut dengan baik. Pengelolaan dan pemanfaatan yang baik berarti menyeimbangkan antara pemanfaatan untuk hal produktif dan konsumtif. Adapun model pemanfaatan remitansi oleh keluarga buruh migran di kecamatan Suralaga adalah sebagai berikut:

Kebutuhan Hidup

Pemanfaatan remitansi untuk kebutuhan hidup sehari-hari menjadi pemanfaatan paling mendasar dan hampir dilakukan oleh semua keluarga pekerja migran di Kecamatan Suralaga. Kebutuhan hidup sehari-hari ini mencakup sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal). Remitansi akan digunakan untuk membeli sembako termasuk makanan, minuman, obat-obatan dan berbagai keperluan rumah tangga lainnya. Pemanfaatan dengan model ini juga tergantung jumlah anggota dari masing-masing keluarga migran. Semakin banyak anggota keluarga, maka jumlah remitansi yang dialokasikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari juga semakin banyak. Selain itu sumber pemasukan masing-masing keluarga juga turut berpengaruh. Pada beberapa keluarga, sumber pemasukan tidak hanya dari remitansi, tetapi juga pekerjaan lain seperti bertani, buruh dan lain sebagainya. Kebutuhan hidup sehari-hari menjadi hal yang paling mendasar, sehingga menjadi model pemanfaatan yang paling banyak digunakan oleh keluarga pekerja migran.

Membangun dan Merenovasi Rumah

Merenovasi atau membangun rumah menjadi salah satu motivasi terbesar para pekerja migran, sehingga menjadi salah satu pemanfaatan remitansi yang paling banyak ditemukan di kecamatan Suralaga. Hal tersebut terbukti melalui penuturan beberapa

informan yang mengaku hasil remitansinya digunakan untuk membangun dan merenovasi rumah. Hasil wawancara ini juga didukung temuan penulis di lapangan yang menunjukkan bahwa rata-rata hunian atau tempat tinggal masyarakat di Kecamatan Suralaga sudah semi permanen dan layak untuk ditinggali. Hal tersebut sebagaimana diungkap dari wawancara berikut:

“Pekerja migran di desa Paok Lombok ini sangat-sangat berhasil. Mereka bisa membangun rumah, membeli sawah dan sebagainya. Perekonomian masyarakat yang dulunya juga buruk sekarang sudah bagus. Kita lihat karena memang pekerja migrannya sangat luar biasa. Di dusun Getap juga dulunya merupakan dusun yang kumuh, namun sekarang rumah warga rata-rata bagus. Dusun ini sebagai dusun dengan perubahan paling mencolok khususnya dari segi hunian atau tempat tinggal di desa Paok Lombok.”

(Kepala Desa Paok Lombok; wawancara tanggal 14 Maret 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut, maka terkonfirmasi bahwa rata-rata masyarakat di kecamatan Suralaga memanfaatkan remitansinya untuk membangun rumah. Perubahan pemukiman kumuh menjadi bagus merupakan salah satu bukti bahwa banyak pekerja migran yang memiliki dorongan tinggi untuk membangun atau merenovasi rumah dari hasil remitansi mereka. Bahkan di dusun Getap yang merupakan salah satu dusun di Desa Paok Lombok, ada sekitar 200-300 orang yang menjadi pekerja migran..

Biaya Pendidikan Anak

Hasil remitansi ini juga banyak digunakan untuk membiayai anak sekolah. Pendidikan anak dianggap sebagai investasi jangka panjang karena pendidikan anak merupakan hal yang sangat penting bagi orang tua. Pada sebagian besar keluarga pekerja migran, remitansi menjadi sumber biaya pendidikan. Temuan penulis di lapangan menunjukkan adanya perbedaan tingkat pendidikan anak yang kedua orang tuanya merantau dengan yang salah satu merantau. Pada kasus kedua orang tua merantau, anak-anak pekerja migran ini biasanya diasuh oleh neneknya. Otomatis pengasuhan dan pengawasan juga akan kurang maksimal, inilah yang kemudian menyebabkan hilangnya motivasi anak untuk belajar dan bersekolah. Seperti penuturan Masitah berikut ini:

“Intinya kalau menurut pengamatan saya selama mengajar, ada perbedaan antara anak pekerja migran dengan anak-anak lain. Meskipun uang kiriman lancar tapi pengawasan dari orang tua tidak ada, ya sulit anak itu akan maju. Kadang ini yang menyebabkan anak-anak ini menjadi malas dan nakal di sekolah. Bahkan ada beberapa murid saya yang anak pekerja migran memilih untuk menikah dan berhenti sekolah”

(Masitah; wawancara tanggal 15 Maret 2022).

Berbeda halnya dengan anak-anak yang ditinggal salah satu dari orang tuanya untuk merantau. Selain biaya pendidikan mereka terjamin oleh remitansi orangtua, mereka juga bisa tetap mendapat pengawasan dan didikan dari orang tua (Ibu atau Bapak). Banyak anak-anak pekerja migran yang mengenyam pendidikan dengan baik bahkan sampai perguruan tinggi, seperti wawancara dengan mantan Kepala Desa Suralaga berikut:

“ada beberapa yang menggunakan hasil remitansi orang tuanya sampai kuliah, ada yang sekolah apoteker. Bahkan ada juga yang kuliah sampai gelar doktor dari hasil remitansi orang tuanya. Jadi pendidikan disini ya Alhamdulillah baik”

(H. Jalal ; wawancara tanggal 13 Maret 2022).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Zuriadi yang merupakan mantan pekerja migran, ia mengaku selama berada di perantauan yang mengurus dan mengawasi anaknya adalah istri di rumah. Hasil remitansinya selama merantau bisa ia gunakan untuk menyekolahkan

anak pertamanya hingga lulus dan menjadi bidan serta anak keduanya sekarang masih mengenyam pendidikan di Universitas Gajah Mada (wawancara 16 Maret 2022).

Membeli Tanah atau Sawah

Remitansi banyak juga dimanfaatkan untuk pembelian tanah atau sawah karena memang potensi desa di kecamatan Suralaga adalah pertanian. Para pekerja migran menginvestasikan remitansinya untuk membeli sawah dengan tujuan agar ketika pulang ke daerah asal mereka bisa mengelola sawah dan juga bisa menjadi sumber pemasukan keluarga. Selain sebagai pekerja migran, masyarakat di kecamatan Suralaga juga banyak yang menjadi petani. Itulah mengapa banyak pekerja migran yang mengalokasikan hasil remitansinya untuk membeli tanah atau sawah.

“Alhamdulillah hasil saya selama menjadi buruh migran saya gunakan untuk memperbaiki rumah dan membeli tanah, karena memang ini tujuan utama saya merantau ke Malaysia waktu itu. Kemudian setelah pulang tanah tersebut saya gunakan untuk menanam sayur-sayuran untuk dijual sampai sekarang. Sehingga uang yang saya dapat dari hasil merantau bisa tetap mengalir dan cukup untuk kebutuhan sehari-hari.”

(Ibrahim; wawancara 17 Maret 2022)

Pertanian juga menjadi salah satu model pemanfaatan remitansi yang paling banyak digunakan oleh pekerja migran di Kecamatan Suralaga. Masyarakat mengaku pekerjaan sebagai petani ini memang sudah turun temurun dari nenek moyang dan masih digeluti sebagian besar masyarakat hingga saat ini. Selain itu kondisi geografis juga turut mempengaruhi pilihan para pekerja migran untuk membeli sawah dan bertani setelah kembali ke kampung halaman. Seperti yang diungkap oleh Muh. Kencana, Sekretaris Desa Paok Lombok:

“Di Kecamatan Suralaga ini memang bisa dibilang lahan pertanian kita termasuk kelas satu, geografis dataran rendah, kemudian debit air juga bagus disini. Curah hujan sedang, jadi cocok untuk pertanian jenis sayur. Inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat untuk bertani termasuk para eks pekerja migran. Tidak hanya di Desa Paok Lombok, kebetulan dari 15 desa di Kecamatan Suralaga ini rata-rata menjadi penghasil sayuran termasuk desa Suralaga, Anjani dan Paok Lombok.”

(Muh. Kencana; wawancara tanggal 14 Maret 2022).

Kebingungan para migran dan keluarga untuk jenis pemanfaatan remitansi juga turut mendorong hal ini. Beberapa keluarga migran mengaku tidak tahu harus memanfaatkan remitansi tersebut untuk apa. Jika dimanfaatkan untuk usaha, mereka mengaku kebingungan harus menjalankan jenis usaha apa dengan keterbatasan modal dan pengetahuan. Inilah yang kemudian mendorong mereka lebih banyak mengalokasikan remitansinya untuk pertanian.

Peternakan

Tidak hanya untuk pertanian, peternakan juga menjadi salah satu tujuan pemanfaatan remitansi bagi pekerja migran di Kecamatan Suralaga. Banyak pekerja migran menginvestasikan hasil remitansi mereka untuk membeli hewan ternak khususnya sapi. Bagi pekerja migran yang masih di luar negeri, hewan ternak biasanya akan dititipkan kepada rekan keluarga untuk di pelihara sampai mereka pulang ke kampung halaman. Seperti yang diungkap oleh Abu Hasyah, mantan pekerja migran,

“Kiriman diterima keluarga dan dikelola untuk investasi ke tanah, ternak sapi dan membangun rumah,”

(Abu Hasyah; wawancara 15 Maret 2022)

Ada juga yang memulai bisnis peternakan dengan menabung terlebih dahulu, kemudian digunakan untuk membeli hewan ternak ketika pulang ke kampung halaman. Seperti yang dilakukan H. Jalaluddin, mantan PMI dan juga mantan kepala desa Suralaga yang kini beternak ayam petelur. Beliau menuturkan bahwa dulu ia pernah mengalami kerugian usaha dan pergi ke Arab Saudi untuk bekerja dan mengumpulkan modal usaha lagi. Setelah pulang, beliau memulai kembali usaha ternak ayam petelurnya dan berjalan hingga sekarang. Sebagai mantan PMI, dia tetap berusaha membantu PMI untuk berangkat ke luar negeri dan mempekerjakan mereka di kandang ayam miliknya. Jika ada PMI yang mencari pekerjaan, dia selalu membantu mereka karena pernah merasakan beratnya sebagai PMI jika tidak ada bantuan orang lain yang berpengalaman. H. Jalaluddin selalu mendebat orang-orang yang membangun wacana untuk menghentikan pengiriman PMI ke luar negeri termasuk PMI ilegal.

Pemaparan di atas merupakan model pemanfaatan remitansi yang umum dilakukan masyarakat di Kecamatan Suralaga. Namun dua tahun terakhir semenjak munculnya pandemi Covid-19 terdapat perbedaan cara keluarga memanfaatkan remitansi. Meskipun tidak terlalu signifikan namun pemanfaatan selama masa pandemi lebih banyak untuk kebutuhan konsumtif atau kebutuhan sehari-hari. Hal ini karena terjadi kemunduran ekonomi di daerah asal sehingga remitansi berperan lebih besar untuk kebutuhan hidup dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19. Seperti yang wawancara berikut dengan mantan pekerja migran asal Paok Lombok,

“kemarin awal pandemi saya dipulangkan karena sesuatu hal. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya menggunakan uang tabungan dari hasil remitansi selama saya bekerja,”
(Zuriadi; wawancara tanggal 17 Maret 2022).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan remitansi sebelum dan selama pandemi mengalami sedikit pergeseran. Sebelum pandemi, pemanfaatan remitansi digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, membangun rumah, pembelian tanah dan sawah, biaya pendidikan anak dan pembelian hewan ternak. Namun selama masa pandemi, pemanfaatan remitansi lebih banyak dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Fenomena yang sama terjadi di daerah pulau Jawa termasuk Jawa Timur yang menjadi daerah pengirim terbesar PMI di Indonesia mengalami penurunan drastis terhadap remitansi mereka. Pekerja migran benar-benar terganggu dengan Covid-19 ini, bahkan banyak di antara mereka yang tidak lagi mampu membantu ekonomi keluarga mereka. Karena perusahaan mereka tutup, maka otomatis *income* mereka juga tidak berjalan lancar seperti sebelumnya dan mereka terhambat mengirim remitansi (Noveria and Romdiati 2022).

Seperti konsep pilihan rasional yang dijelaskan James Coleman yakni teori pilihan rasional. Menurut teori ini tindakan yang dilakukan seseorang didasarkan pada pilihan-pilihan rasional atas pertimbangan untung dan rugi. Rasional dalam konteks ini diartikan sebagai kepentingan subjektif aktor. Sehingga dalam hal ini keluarga migran menentukan cara mereka mengelola remitansi berdasarkan kepentingan masing-masing keluarga. Selain itu keluarga migran juga akan mengelola remitansi dengan cara paling menguntungkan menurut mereka. Umumnya pilihan mereka didasarkan pada kondisi masing-masing keluarga seperti jumlah remitansi, jumlah tanggungan, frekuensi pengiriman remitansi, dan lain-lain. Dalam konteks ini pengelolaan remitansi oleh keluarga pekerja migran kecamatan Suralaga mayoritas didasarkan pada kondisi ekonomi keluarga akibat pandemi Covid-19.

Peran Pemerintah dalam Membantu Pengelolaan Remitansi Keluarga PMI

Remitansi menjadi salah satu hal yang berperan besar di masyarakat kecamatan Suralaga karena tingginya jumlah masyarakat yang bekerja sebagai pekerja migran. Selama

masa pandemi, pemerintah berupaya untuk membantu menstabilkan ekonomi masyarakatnya. Dalam hal ini pemerintah di kecamatan Suralaga tepatnya di desa Dasan Borok memaksimalkan potensi desa dengan memberikan bantuan bibit tani dan hewan ternak. Ini dilakukan agar masyarakat desa Dasan Borok bisa tetap bertahan di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi. Selain untuk masyarakat umum, terdapat juga upaya yang khusus menyasar keluarga pekerja migran berupa pembentukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

UMKM yang ada di Dasan Borok ini merupakan UMKM yang dibentuk khusus untuk mantan pekerja migran. Itulah sebabnya karyawan di sini terdiri dari para mantan pekerja migran perempuan yang berasal dari Dasan Borok. Dengan adanya UMKM ini pemerintah berharap dapat memberikan modal berupa pengetahuan dan kemampuan bagi para eks pekerja migran agar tidak kebingungan dalam mengelola hasil remitansi ketika pulang ke daerah asal. Pengelolaan remitansi yang kurang tepat menjadi sorotan di beberapa daerah penyumbang migran termasuk kecamatan Suralaga. Sebagian besar alasan mantan pekerja migran kembali lagi ke perantauan karena uang hasil remitansi hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga dalam jangka waktu pendek. Ketika uang tersebut habis, maka tingkat perekonomian keluarga migran juga akan menurun. Tidak semua mantan pekerja migran memiliki pengetahuan dan kemampuan berwirausaha, begitupun juga keluarga mereka di daerah asal. Pembentukan UMKM ini menjadi salah satu upaya pemerintah membantu menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada mantan pekerja migran.

Selain itu sulitnya mencari pekerjaan dan rendahnya upah di daerah asal membuat para mantan pekerja migran memilih untuk merantau lagi, karena upah yang didapat di luar negeri jauh lebih tinggi. Bahkan pola mobilitas para migran yang terjadi secara berulang tersebut telah menyebabkan pergeseran tujuan migrasi. Awalnya tujuan migrasi karena ingin mendapatkan gaji yang lebih besar dan ingin memperbaiki perekonomian keluarga. Namun, saat ini pada beberapa orang pekerjaan sebagai migran dijadikan sebagai sebuah hobi dan kebiasaan, bukan lagi karena kebutuhan. Berikut wawancara dengan Kepala Desa Dasan Borok:

“Dengan adanya program yang di tawarkan tadi untuk sementara ini diakui ada beberapa yang kita jumpa untuk UMKM dan pembinaanya itu, bisa mengubah mindset. Rata-rata mental masyarakat karena perbulan itu sedikit, maka kembalilah menjadi buruh migran. Dan ada juga temuan masyarakat yang bahkan sudah punya rumah, punya sawah pun tapi mungkin kenyamanan atau sekaligus jadi hobi ke Malaysia”
(Angga Sarimah; wawancara tanggal 24 Maret 2022).

Tidak hanya sebelum pandemi, pengelolaan remitansi selama masa pandemi juga turut menjadi perhatian, khususnya bagi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berusaha untuk perlahan melepas masyarakatnya dari ketergantungan menjadi pekerja migran. Melalui UMKM ini pemerintah berupaya mendorong masyarakat khususnya keluarga migran untuk mengelola remitansi dengan lebih produktif agar uang tersebut tidak hanya habis untuk kebutuhan konsumtif saja. Selain secara khusus untuk mantan pekerja migran, selama masa pandemi ini pemerintah juga berupaya mengoptimalkan potensi desa yakni pertanian dan peternakan sebagai penopang ekonomi masyarakat. Seperti UMKM di desa Dasan Borok, tidak hanya diperuntukkan bagi mantan pekerja migran tetapi juga untuk para petani lokal. UMKM tersebut bekerja sama dengan para petani lokal dengan cara membeli hasil-hasil pertanian yang kemudian dijadikan bahan baku pembuatan jajanan oleh UMKM tersebut. Sebagaimana yang diungkap ketua UMKM Dasan Borok:

“Misalnya labu, harganya kan bisa dibilang murah. Kalau petani jual di pasar dengan harga Rp 10.000,00 namun di UMKM bisa mereka jual dengan harga Rp 15.000,00 tanpa harus mengeluarkan ongkos kendaraan ke pasar

untuk menjual dan sehingga disini kita saling membantu dengan para petani yang ada.”

(Lili Hariani; wawancara tanggal 24 Maret 2022).

Berdasarkan wawancara di atas, di kecamatan Suralaga khususnya desa Dasan Borok terdapat kebijakan pemerintah untuk penguatan ekonomi selama masa pandemi menyasar keluarga dan mantan pekerja migran. Bentuk upaya pemerintah adalah menanamkan jiwa kewirausahaan dengan membentuk UMKM agar hasil remitansi para pekerja migran tidak hanya dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif. Kemudian juga turut membantu para petani dengan cara menjalin kerjasama antar UMKM dengan petani untuk pembelian bahan baku jajanan dari hasil para petani lokal. Selain untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan penguatan ekonomi mantan pekerja migran serta petani, pembentukan UMKM ini juga sebagai upaya mengurangi ketergantungan masyarakat pada pekerjaan sebagai migran. Maka selama UMKM ini berjalan para mantan pekerja migran juga harus diberikan pemahaman terkait keuntungan jika mereka tidak lagi bekerja diluar negeri.

“Para mantan pekerja migran perempuan ini kan biasanya mendapatkan gaji yang jauh lebih besar, sedangkan disini hanya mendapatkan sekian persen dibanding gaji di luar negeri, hanya bisa untuk makan saja. Nah, dari sinilah saya sering merasa kesulitan untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa lebih baik mana bekerja di luar negeri tetapi jauh dari keluarga, disini meskipun gaji sedikit tapi tetap bisa bersama keluarga. Sejauh ini ada yang memahami dan ada juga yang tetap ingin kembali merantau”

(Lili Hariani; wawancara tanggal 24 Maret 2022).

Informasi dari wawancara tersebut ini menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat pada pekerjaan sebagai migran sudah sangat besar, sehingga kesulitan untuk mengubah mindset para mantan pekerja migran untuk bekerja di daerah asal. Di luar dari segala risiko baik untuk migran dan keluarganya, perbedaan gaji yang cukup jauh dengan pekerjaan di daerah asal menjadi salah satu alasan terbesar para mantan pekerja migran untuk terus kembali merantau. Meskipun begitu, upaya yang dilakukan pemerintah seperti yang dilakukan di desa Dasan Borok ini sebagai bentuk perhatian khusus kepada para mantan pekerja migran dan keluarga.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

SIMPULAN

Remitansi pekerja migran rata-rata mengalami penurunan karena mengalami berbagai dampak pandemi seperti dirumahkan, pengurangan jam kerja, bahkan dipulangkan ke daerah asal. Oleh karena itu peran remitansi tidak bisa maksimal di tengah pandemi pada keluarga pekerja migran legal. Berbeda halnya dengan pekerja migran ilegal yang rata-rata tidak merasakan dampak pandemi khususnya terhadap gaji dan remitansi. Mereka tetap mengirimkan remitansi untuk keluarganya selama masa pandemi. Secara umum, pemanfaatan remitansi oleh keluarga pekerja migran di Kecamatan Suralaga adalah untuk kebutuhan sehari-hari, pembangunan rumah, biaya pendidikan anak, pembelian tanah atau sawah, serta membeli hewan ternak. Selama masa pandemi terjadi pergeseran cara pengelolaan remitansi yakni lebih banyak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini karena terjadi kemunduran ekonomi di daerah asal dan berbagai permasalahan yang dialami pekerja migran di luar negeri. Sehingga selama masa pandemi, keluarga pekerja migran mengalokasikan lebih banyak remitansi untuk kebutuhan sehari-hari dibanding sebelum masa pandemi.

Peran pemerintah dalam hal pemanfaatan remitansi dalam keluarga pekerja migran adalah dengan menanamkan jiwa kewirausahaan melalui pembentukan UMKM khusus untuk para mantan pekerja migran agar hasil remitansi selama bekerja tidak hanya dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif saja tetapi juga untuk hal-hal produktif yang dapat menunjang perekonomian keluarga migran dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, pembentukan UMKM ini juga sebagai upaya mengurangi ketergantungan masyarakat pada pekerjaan sebagai migran.

REKOMENDASI

Melihat peran remitansi yang besar bagi keluarga pekerja migran, maka pengelolaan dan pengalokasiannya harus dimaksimalkan. Selain keluarga pekerja migran, pemerintah juga harus turut berkontribusi memberikan pendampingan dalam hal perbaikan pengelolaan remitansi kelompok pekerja migran. Seperti yang dilakukan pemerintah desa Dasan Borok yang mengupayakan pelatihan kewirausahaan bagi para mantan pekerja migran melalui pembentukan UMKM. Hal ini tentu perlu dicontoh oleh pemerintah di desa-desa lain yang ada di Lombok Timur khususnya kecamatan Suralaga, baik melalui upaya yang sama atau berbeda. Dengan adanya upaya semacam ini diharapkan keluarga pekerja migran dapat mengelola dan memanfaatkan remitansinya dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbud yang telah mendanai penelitian ini dalam skema riset MBKM tahun 2022. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tokoh Masyarakat di Suralaga; Pemerintah Desa; Pekerja Migran Indonesia di desa Suralaga, desa Paok Lombok dan, desa Dasan Borok; Penyalur PMI; Aktivis Pemerhati PMI/LSM; dan *Stakeholders* terkait partisipasi dan kerjasamanya sehingga penelitian ini bisa terlaksana dengan baik, lancar dan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjaeni, Rahma. 2020. "Sebanyak 32.192 Pekerja Migran Telah Pulang dari Negara Terdampak Wabah Virus Corona." *Kontan.co.id*, 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/sebanyak-32192-pekerja-migran-telah-pulang-dari-negara-terdampak-wabah-virus-corona>.
- Ariyani. 2019. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Remitansi Migran Internasional di Indonesia." Universitas Hasanuddin. *Tesis*.
- Aswindo, Munarni, Margaretha Hanita, dan Arthur Josias Simon. 2021. "Kerentanan dan Ketahanan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pada Masa Pandemic COVID-19." *Jurnal Lemhannas RI* 9 (1): 442–52.
- Dewandaru, Bothy, Afif Nur Rahmadi, dan Evi Husniati Sya'idah. 2019. "Pemanfaatan Remitansi Pekerja Migran Indonesia serta Peran Usaha Pekerja Migran Indonesia Purna untuk Pembangunan Desa Asal." *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)* 2 (2): 44–50.
- Ikrimah, Afridah, dkk. 2020. *Panduan Pengelolaan Remitansi Pada Rumah Tangga Untuk Kegiatan Ekonomi Produktif*. Bantul: Absolute Media.
- Maghribie, Abdul Fattah, Trisnaningsih, dan Edy Haryono. 2019. "Pemanfaatan Remitan Tenaga Kerja Indonesia Di Desa Bumi Jaya Kecamatan Candipuro." *JPG (Jurnal Penelitian Geografi)* 7 (5).
- Mahesti, Mitha, Choirul Amin, dkk. 2021. "Analisis Pengaruh Perubahan Pola Mobilitas Dan Remitansi TKI Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Keluarga Migran (Studi Kasus Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen)." Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Mustapita, Arini Fitria, and Mohammad Rizal. 2017. "Analisis Pola Penggunaan Remitan Migrasi Internasional Secara Produktif Dan Konsumtif Di Kabupaten Malang." *JU-Ke (Jurnal Ketahanan Pangan)* 1 (2): 6–10.
- Noveria, Mita, and Haning Romdiati. 2022. "Pandemi Covid-19 Dan Dampak Ekonomi Pada Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya: Sebuah Kajian Pustaka." *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 13 (1): 71–84.
- Nurdiansyah, Rusdy . 2021. Cerita Setahun Lalu, Pasien Covid 01 dari Depok. Maret 2. <https://news.republika.co.id/berita/qpc1h328/cerita-setahun-lalu-pasien-covid-01-dari-depok>.
- Primawati, Anggraeni. 2011. "Remitan Sebagai Dampak Migrasi Pekerja Ke Malaysia." *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 16 (2): 209–22.
- Qawiyurrijal, Nashruddin. 2021. "Pekerja Migran Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Bingkai Media Daring (Analisis Framing Model Robert N. Entman Pada Portal Berita Bbc News Indonesia Periode Januari--Mei 2020)." Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Retaduari, Elza Astari. 2022. 2 Maret 2020, Saat Indonesia Pertama Kali Dilanda Covid-19. Maret 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/02/10573841/2-maret-2020-saat-indonesia-pertama-kali-dilanda-covid-19>.
- Ronal. 2020. Berlaku Hari Ini, Menaker Stop Sementara Pengiriman TKI Ke Luar Negeri. Maret 20. <https://pasardana.id/news/2020/3/20/berlaku-hari-ini-menaker-stop-sementara-pengiriman-tki-ke-luar-negeri/>.
- Sofuroh, Faidah Umu . 2020. Data Kemnaker: Pekerja Terdampak COVID-19 Capai Sekitar 3 Juta Orang. Mei 10. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5009421/data-kemnaker-pekerja-terdampak-covid-19-capai-sekitar-3-juta-orang>.
- Sukesi, Keppi, Henny Rosalinda, dkk. 2017. *Migrasi Perempuan, Remitansi, Dan Perubahan Sosial Ekonomi Pedesaan*. Universitas Brawijaya Press.
- Susilo, Singgih, dan Marhadi. 2016. "Model Manajemen Remitansi Pada Rumah Tangga TKI di Pulau Bawean." *Prosiding Univeritas Wiraraja*.
- Tangkere, Ellen G, dkk. 2018. "Alokasi Remitansi Pendapatan Keluarga Migran di Kecamatan Langowan Utara." *AGRI-SOSIOEKONOMI* 14 (2): 237–46.
- Wiryawan, I Wayan. 2020. "Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia." *Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020*.
- Yolanda, Fitri. 2020. "Pola Pemanfaatan Remitan (*Remittance*) Perantau Nagari Atar, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Sosiologi Andalas* 6 (1): 42–55.

Remitansi Pekerja Migran pada Masa Pandemi Covid-19 di Lombok Timur

(Saipul Hamdi, Syarifuddin, Oryza Pneumatica Inderasari, Lina Febriani, Nurul Haromain, Ikmal Maulana, dan Ihfan Rahmawadi)